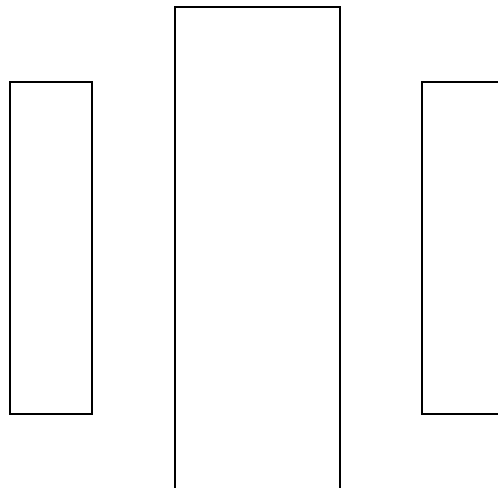




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
TAHUN 2018**



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN NGANJUK**

---



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dengan diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka LAKIP ini disusun sebagai perwujudnya pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengacu pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 – 2018. Di dalam Renstra ditetapkan Visi Dinsos PPPA adalah terwujudnya kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak.

Untuk itu sejak tahun 2017 ditetapkan kebijakan pembinaan partisipasi sosial masyarakat, peningkatan kualitas hidup bagi PMKS, peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati perempuan secara optimal, peningkatan kualitas SDM perempuan dan meningkatkan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan ditetapkan program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Untuk terwujudnya peningkatan perlindungan perempuan dan anak melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan,

program penguatan kelembagaan, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinsos PPPA sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian kinerja Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018.

Dalam tahun 2018 terdapat sasaran untuk terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial, terwujudnya penurunan jumlah PMKS dan meningkatnya pemberdayaan responsif gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara garis besar kinerja organisasi dapat mencapai sasaran tersebut.

Demikian Rencana Strategi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja dan peluang-peluang menuju peningkatan perbaikan yang terus dilakukan dan masih terbuka.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
DAFTAR ISI .....	3
BAB I : PENDAHULUAN .....	4
<b>A. Tugas Pokok dan Fungsi</b> .....	4
<b>B. Struktur Organisasi</b> .....	5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	9
<b>A. Visi</b> .....	9
<b>B. Misi</b> .....	12
<b>C. Tujuan</b> .....	16
<b>D. Sasaran</b> .....	16
<b>E. Strategis Mencapai Tujuan dan Sasaran</b> .....	17
<b>F. Penetapan Kinerja Tahun 2018</b> .....	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
<b>A. Capaian Kinerja</b> .....	24
<b>B. Permasalahan dan Solusi</b> .....	32
<b>C. Akuntabilitas Keuangan</b> .....	34
BAB IV : PENUTUP.....	38
DAFTAR LAMPIRAN :	
Lampiran I : <b>Tabel Rencana Program dan Kegiatan     Tahun 2019</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran umum Organisasi**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk :

#### **1. TUGAS POKOK**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **FUNGSI**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan sosial dan Perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas :

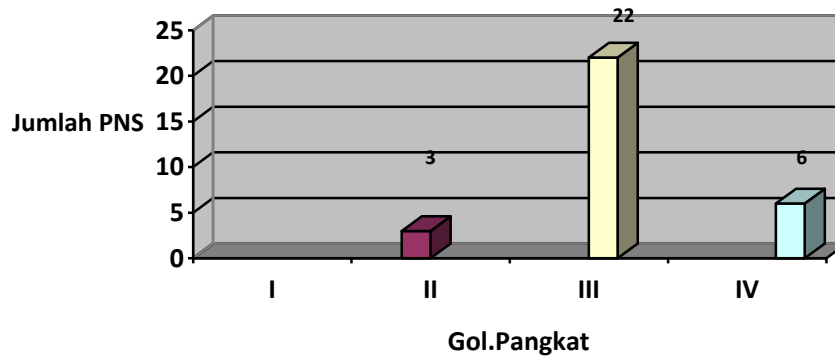
1. Sekretariat terdiri dari
  - 1) Subbagian Program dan Evaluasi
  - 2) Subbagian Umum
  - 3) Subbagian Keuangan
2. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari
  - 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
  - 3) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari
  - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
  - 2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat
  - 3) Seksi Penanganan Fakir Miskin
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat terdiri dari
  - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender
  - 2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
  - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari
  - 1) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
  - 2) Seksi Fasilitasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2016 terdapat jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk di tahun 2018, yakni :

1. Eselon II = 1 orang
2. Eselon III = 4 orang
3. Eselon IV = 15 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh aparatur sebanyak 31 orang dengan perincian menurut golongan sebagai berikut :

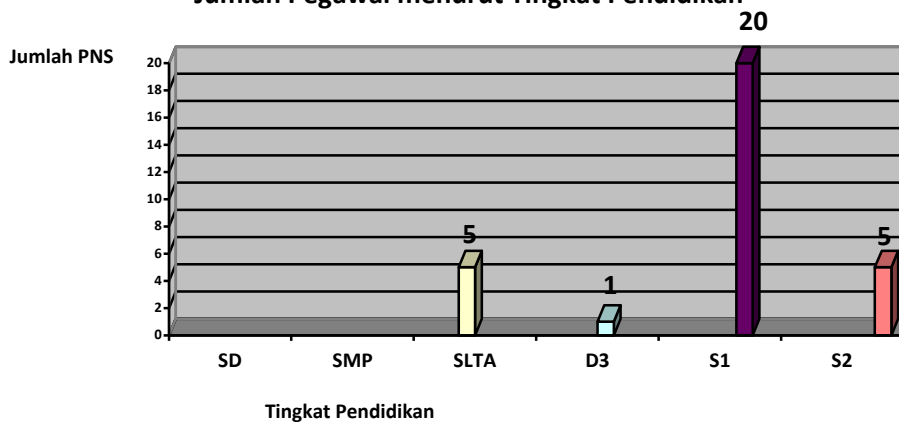
**Jumlah Pegawai menurut Golongan Kepangkatan**



Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk

Sedangkan kondisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menurut Tingkat Pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**



Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk



## **B. Aspek Strategis**

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pelayanan dapat ditinjau dari beberapa aspek strategis, antara lain :

### **1. Kelembagaan**

Pembentukan kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPPA) Nganjuk didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk jo Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

### **2. Hasil Kerja**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPPA) Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan perlindungan dalam bidang sosial terhadap lansia, perempuan dan anak.
- 2) Melaksanakan jaminan dan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dan gelandangan.
- 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- 4) Memberikan rehabilitasi dan bantuan sosial kepada fakir miskin yang membutuhkan atau masyarakat yang mengalami bencana alam.
- 5) Melaksanakan sosialisasi dan roadshow kepada masyarakat maupun lembaga pendidikan mengenai perlindungan perempuan dan anak.
- 6) Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta dan pemberdayaan perempuan dan anak.

- 7) Memberikan pendampingan, perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

### **C. Permasalahan Utama**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, maka perlu adanya penentuan isu-isu strategis sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Isu-isu strategis Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 - 2018 yang harus ditangani secara berkesinambungan adalah :

1. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Masih kurangnya penanganan anak jalanan (Anjal), anak terlantar, anak putus sekolah dan anak korban narkoba;
3. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA);
5. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Lemahnya kelembagaan dan jaringan perlindungan anak;
7. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Program dan Kegiatan**

Pada hakekatnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 2017 - 2018 merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan efektifitas, efisiensi, produktivitas serta derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak yang diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah, Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk menetapkan Rencana Strategis 2017 - 2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2017 - 2018.

#### **1. Visi**

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018.

Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014 – 2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KEJAYAAN NGANJUK BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA, DENGAN PRIORITAS SEKTOR UTAMA PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BERBASIS POTENSI PERTANIAN UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci yaitu :

- Terwujudnya, terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kejayaan Kabupaten Nganjuk yang berlandaskan iman dan taqwa.
- Kejayaan, suatu keadaan / kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih serta mempunyai daya saing yang tinggi sehingga menjadikan Kabupaten Nganjuk besar dan unggul.
- Iman dan Taqwa, bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk merupakan masyarakat yang agamis.
- Keadilan, yaitu bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Nganjuk dan mengurangi kesenjangan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek gender.
- Kesejahteraan, untuk mewujudkan masyarakat Nganjuk yang sejahtera yaitu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan bathin, harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dalam pengertian ada

keseimbangan dengan peningkatan kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) misi Bupati dan Wakil Bupati guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Nganjuk dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Misi tersebut ditujukan untuk terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima untuk mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Misi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan sebagai salah satu OPD pelaksana urusan OTODA merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan sosial secara tepat, efisien, efektif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berciri transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi yang ditetapkan diharapkan agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak serta pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan program, pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi hasil kegiatan. Oleh karenanya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dirumuskan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, yaitu **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak, Kesetaraan Gender dan Terpenuhi Hak Anak”**.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan pembangunan kehidupan sosial di Kabupaten Nganjuk secara terpadu.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a) Pelayanan, adalah aksi / kegiatan dalam rangka penanganan atas kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b) Pembinaan, adalah segala upaya dan arahan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas hidup bagi perempuan dan anak;
- c) Peningkatan, adalah suatu kondisi yang menjadi lebih baik dibanding kondisi sebelumnya;

## **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pembinaan bimbingan usaha-usaha kesejahteraan sosial, kesadaran rasa tanggungjawab sosial masyarakat, pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha untuk kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial.

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Nganjuk.

### 1. Analisa S W O T

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, maka perlu adanya penentuan isu-isu strategis sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Sebagai bentuk pematapan dalam menentukan isu-isu strategis digunakan analisis lingkungan strategis / Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

- *Strength* (Kekuatan)
  1. Adanya undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang masalah sosial, perempuan dan anak.
  2. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak.
  3. Adanya sumberdaya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinsos PPPA.
  4. Adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan anak.
- *Weakness* (Kelemahan)
  1. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  2. Masih kurangnya penanganan anak jalanan (Anjal), anak terlantar, anak putus sekolah dan anak korban narkoba.

3. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utama Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA).

- *Opportunity* (Peluang)

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
4. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
6. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



- *Threats* (Tantangan)
  1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
  2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
  3. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
  4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
  5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
  6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
  7. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
  8. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 – 2018 adalah :

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
2. Kebutuhan terhadap data kemiskinan yang terpadu, valid dan update semakin meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
4. Pengelolaan data kemiskinan semakin terintegrasi guna mendukung kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan
5. Pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak semakin meningkat
6. Kesempatan perempuan dalam partisipasi pemerintahan, politik dan pembangunan semakin meningkat
7. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak semakin meningkat
8. Partisipasi masyarakat dalam penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat

## **2. Tujuan**

- a. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
- b. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

## **3. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa RENSTRA (tahunan, semesteran, tribulanan, atau bulanan).

Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran-sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

	Tujuan			Sasaran
1.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial		1.1.1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
			1.1.2	Terwujudnya penurunan jumlah PMKS
2.1	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak		2.1.1	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sehingga perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam RENSTRA Tahun **2017 - 2018** dapat disimpulkan mencakup 2 tujuan, 3 sasaran dan 2 komponen misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Ketiga sasaran tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan urusan wajib maupun urusan pilihan.

#### **4. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan serta sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dapat mewujudkan hasil yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 2 (dua) tahun kedepan (**2017 - 2018**), ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

### **Kebijakan**

- a. Pembinaan partisipasi sosial masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial melalui peningkatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial);
- c. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati perempuan secara optimal dalam pengambilan kebijakan terkait dengan peranan perempuan;
- d. Peningkatan kualitas SDM perempuan sehingga menjadi insan yang mandiri;
- e. Meningkatkan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **Program**

Dalam pencapaian tujuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan sebagai implementasi :

- a. Untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dan penurunan jumlah PMKS melalui Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, Program pembinaan anak terlantar dan anak jalanan, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti

Jompo, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

- b. Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan responsif gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

## **B. Penetapan Kinerja Tahun 2018**

### **1. Sasaran Kinerja Tahun 2018**

Sasaran kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan sasaran kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sasaran kinerja tahun 2018 sebagaimana Form Rencana Kinerja Tahun 2018.

### **2. Standart Penilai Kinerja**

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan Program pembinaan anak terlantar dan anak jalanan, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program-program ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas dan jangkauan

pelayanan sosial dengan indikator kerja persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial menurun dan nilai SKM baik.

- b. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Program-program ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak meningkat.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus benar-benar mangacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini. Demikian pula dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), haruslah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut :

### 3. *Input*

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan *input*.

### 4. *Proses*

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses / kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar / ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

### 5. *Output*

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas / kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *outputnya* sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas / kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.

### 6. *Outcome*

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi.



Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara *output* dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah *output* / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah *output* / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah *output* / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah *output* / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah *output* / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah *output* / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah *output* / kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

#### A. Capaian Kinerja

No	Sasaran / Hasil	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	X	
2.	Terwujudnya penurunan jumlah PMKS		X
3.	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		X

**Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		TARGET % 2018	REALISASI % 2018	CAPAIAN %
1. Terwujudnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	1.1. Nilai SKM baik	Baik	Baik	100
2. Terwujudnya penurunan jumlah PMKS	2.1 Prosen jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial menurun	5,57	7,15	77,9
3. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender serta perlindungan	3.1. IDG meningkat	71	66,97	94,32
	3.2. Persentase penyelesaian kasus tindak	100	75,45	75,45

terhadap perempuan dan anak	kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak			
-----------------------------	---	--	--	--

**Analisis terhadap pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut :**

- 1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
  - 1.1 Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, maka dapat diukur dengan indikator nilai SKM baik.
 

Pada tahun 2018 nilai SKM yang dicapai oleh Dinas Sosial PPPA adalah 78,88 masuk dalam kategori BAIK. Hal ini dicapai dengan memberikan kuisisioner kepada masyarakat terkait pelayanan pembuatan pengantar KIS (Kartu Indonesia Sehat). Nilai ini dihitung dengan rumus :

Total nilai persepsi per unsur/Total unsur yang terisi x Nilai penimbang  
Atau nilai indeks x nilai dasar
  - 1.2 Indikator kedua adalah prosen jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa dihitung dengan rumus :
 

$(\text{Jumlah PMKS tahun } n / \text{Jumlah penduduk tahun } n) \times 100\%$

Pada tahun 2018 ini realisasi persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah sebesar 7,15% (74.937 orang, jumlah penduduk 1.048.799 orang)sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 5,57% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2017 yaitu sebesar 77,9%.

Untuk realisasi anggaran adalah sebesar 77,88% dari anggaran sebesar Rp 2.763.800.000 realisasi sebesar Rp 2.152.460.155

2 Meningkatnya pemberdayaan responsif gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

2.1 Indikator pertama adalah kenaikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) bisa dihitung dengan rumus :

$\frac{1}{3} \times (\text{Indeks partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan parlemen} + \text{Indeks posisi perempuan dalam posisi profesional} + \text{Indeks distribusi pendapatan perempuan dalam perempuan})$  diperoleh angka 66,97%. Target yang ditetapkan adalah 71% sehingga pencapaian kinerja sebesar 94,32%

2.2 Indikator kedua adalah persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak bisa dihitung dengan rumus :

$(\text{Jumlah pengaduan kasus} / \text{Jumlah kasus yang terselesaikan}) \times 100\%$

Pada tahun 2018 ini realisasi penyelesaian kasus 75,45% dari 167 kasus dapat diselesaikan sebanyak 126 kasus terselesaikan per Desember 2018, sisanya sebanyak 41 kasus masih dalam proses samapi sekarang (Januari 2019).

Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 76,55% hal ini dari rencana anggaran Rp. 1.995.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.527.377.906,-.

Sebagai data pendukung adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Keterangan		
		Target	Realisasi	Pencapaian
1	Nilai SKM	Baik	Baik	100%
2	Persentase jumlah PMKS	5,57%	7,15%	77,9%
3	IDG	71%	66,97%	94,32%
4	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak	100%	75,45%	75,45%

No	Penyelesaian Kasus	
1	Jumlah Kasus	167
2	Jumlah Kasus yang diselesaikan	126
3	Jumlah kasus belum selesai/dalam proses	41
4	% capaian kinerja	75,45%

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sebagai berikut :

**Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2018**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk**

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
	<b>Belanja Langsung</b>				
<b>1 06 1 06 01 01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>554.450.000</b>	<b>431.040.072</b>	<b>123.409.928</b>	<b>77,74</b>
1 06 1 06 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.333.430	166.570	88,90
1 06 1 06 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	89.400.000	57.445.366	31.954.634	64,26
1 06 1 06 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.000.000	53.757.600	242.400	99,55
1 06 1 06 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000	50.888.100	24.111.900	67,85
1 06 1 06 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000	12.352.650	3.647.350	77,20
1 06 1 06 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	15.000.000	7.658.500	7.341.500	51,06
1 06 1 06 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	6.000.000	5.463.500	536.500	91,06
1 06 1 06 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	72.550.000	39.605.725	32.944.275	54,59
1 06 1 06 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	199.995.201	4.799	100
1 06 1 06 01 01 20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000	2.540.000	22.460.000	10,16

<b>1 06 1 06 01 02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.212.375.000</b>	<b>1.126.833.443</b>	<b>85.541.557</b>	<b>92,94</b>
1 06 1 06 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	593.700,000	563.952.000	29.748.000	94,99
1 06 1 06 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80.000.000	78.633.250	1.366.750	98,29
1 06 1 06 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	93.500.000	85.569.000	7.931.000	91,52
1 06 1 06 01 02 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000	47.652.500	2.347.500	95,31
1 06 1 06 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	165.000.000	149.469.300	15.530.700	83,49
1 06 1 06 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	190.175.000	178.472.393	11.702.607	93,85
1 06 1 06 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.500.000	9.900.000	2.600.000	79,20
1 06 1 06 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	6.885.000	8.115.000	45,90
1 06 1 06 01 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.500.000	6.300.000	6.200.000	50,40
<b>1 06 1 06 01 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>91,67</b>
1 06 1 06 01 03 08	Penyediaan biaya instruktur senam PNS	4,800,000	4.400.000	400.000	91,67
<b>1 06 1 06 01 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>98</b>
1 06 1 06 01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.500.000	2.450.000	50.000	98
1 06 1 06 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,500,000	2.424.000	76.000	96,96
1 06 1 06 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	9.826.000	174.000	98,26
<b>1 06 1 06 01 15</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.236.540.000</b>	<b>1.107.018.255</b>	<b>129.521.745</b>	<b>89,53</b>

1	06	1	06	01	15	07	Peningkatan kualitas pelayanan saran dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi keluarga PMKS	260.000.000	212.606.700	47.393.300	81,77
1	06	1	06	01	15	13	Fasilitasi dan pembinaan lansia	65.000.000	58.475.205	6.524.795	89,96
1	06	1	06	01	15	15	Penanganan masalah sosial korban bencana	246.540.000	234.702.350	11.837.650	95,20
1	06	1	06	01	15	22	Biaya operasional bantuan sosial bagi lansia miskin	140.000.000	126.499.000	13.501.000	90,36
1	06	1	06	01	15	23	Pendampingan program keluarga harapan (PKH)	290.000.000	267.750.200	22.249.800	92,33
1	06	1	06	01	15	29	Evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk	65.000.000	52.826.000	12.174.000	81,27
1	06	1	06	01	15	30	Monitoring dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	170.000.000	154.158.800	15.841.200	90,68
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pembinaan Anak Terlantar dan Anjal</b>	<b>80.000.000</b>	<b>56.655.000</b>	<b>23.345.000</b>	<b>70,82</b>
1	06	1	06	01	16	02	Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar	40.000,000	33.135.000	6.685.000	82,84
1	06	1	06	01	15	18	Pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan	40.000.000	23.520.000	16.480.000	58,80
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma</b>	<b>52.800.000</b>	<b>48.215.000</b>	<b>4.585.000</b>	<b>91,32</b>
1	06	1	06	01	17	03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan Eks trauma	52,800,000	48.215.000	4.585.000	91,32
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>580.160.000</b>	<b>258.343.250</b>	<b>321.816.750</b>	<b>44,53</b>
1	06	1	06	01	18	08	Penanganan eks psikotik dan penderita gangguan jiwa	65.000.000	43.595.250	21.404.750	67,07
1	06	1	06	01	18	09	BOP Beras keluarga sejahtera	225.000.000	214.748.000	10.252.000	95,44
1	06	1	06	01	18	10	BOP Pemutakhiran BDT penanganan fakir miskin	290.160.000	0	0	0

1	06	1	06	01	19	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo</b>	35.000.000	33.194.900	1.805.100	94,84	
1	06	1	06	01	19	08	Pembinaan dan fasilitasi orang dengan kebutuhan khusus	35.000.000	33.194.900	1.805.100	94,84
1	06	1	06	01	20	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	779.300.000	649.033.750	130.266.250	83,28	
1	06	1	06	01	20	02	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	90.000.000	46.314.500	43.685.500	51,46
1	06	1	06	01	20	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	356.000.000	312.922.000	43.078.000	87,90
1	06	1	06	01	20	05	Pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan	313.300.000	274.469.250	38.830.750	87,61
1	06	1	06	01	20	13	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	20.000.000	15.328.000	4.672.000	76,64
2	02	1	06	01	15	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	400.000.000	320.843.998	79.156.002	80,21	
2	02	1	06	01	15	05	Roadshow perlindungan perempuan dan anak di lembaga pendidikan	100.000.000	83.154.600	16.845.400	83,15
2	02	1	06	01	15	06	Raperda penyelenggaraan kabupaten layak anak	125.000.000.00	97.486.000.	27.514.000.	77,99
2	02	1	06	01	15	07	Pembuatan profil anak tentang data pilah klaster hak anak	110.000.000	81.365.000	28.635.000	73,97
2	02	1	06	01	15	09	Pembinaan terpadu atau razia bagi anak usia sekolah yang berperilaku salah	15.000.000	12.740.000	2.260.000	84,93
2	02	1	06	01	15	10	Sosialisasi program pengembangan kabupaten layak anak bagi masyarakat	50.000.000	46.098.398.000	3.901.602.	92,20



2	02	1	06	01	16	14	Pelatihan usaha ekonomi produktif perempuan	30.000.000	29.129.4000	870.600	97,10
2	02	1	06	01	01	17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	535.250.000	457.752.600	77.497.400	85,52
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender</b>	<b>210.000.000</b>	<b>155.969.000</b>	<b>54.031.000</b>	<b>74,27</b>
2	02	1	06	01	16	10	Pembinaan perlindungan anak dan kongres anak	100.000.000	89.752.900	10.247.100	89,75
2	02	1	06	01	16	11	Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	110.000.000	66.216.100	43.783.900	60,20
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>570.000.000</b>	<b>382.856.800</b>	<b>187.143.200</b>	<b>67,17</b>
2	02	1	06	01	17	05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	35.000.000	29.888.000	5.112.000	85,39
2	02	1	06	01	17	08	Fasilitasi perempuan korban KDRT dan perlindungan anak di Kabupaten Nganjuk	320.250.000	279.549.000	40.701.000	87,29
2	02	1	06	01	17	11	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dna sejahtera (P2WKSS)	130.000.000	122.923.600	7.076.400	94,56
2	02	1	06	01	17	13	Pelatihan KHA bagi pendamping dan konseling korban KTPA	35.000.000	25.392.000	9.608.000	72,55
2	02	1	06	01	17	14	Optimalisasi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak bagi petugas P2TP2A	15.000.000	0,00	15.000.000	0,00
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>730.000.000</b>	<b>514.845.900</b>	<b>215.154.100</b>	<b>70,53</b>
2	02	1	06	01	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	235.000.000	170.952.900	64.047.100	72,75
2	02	1	06	01	18	07	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	105.000.000	73.624.500	31.375.500	70,12

2	02	1	06	01	18	13	Pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan	170.000.000	152.644.400	17.355.600	89,79
2	02	1	06	01	18	14	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak	100.000.000	72.967.600	27.032.400	72,97
2	02	1	06	01	18	15	Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi pengurus pondok pesantren	100.000.000	72.967.600	27.032.400	72,97
2	02	1	06	01	18	16	Kegiatan TOT pengarusutamaan gender	50.000.000	44.506.500	5.493.500	89,01
2	02	1	06	01	18	17	Pembuatan profil gender	70.000.000	150.000	69.850.000	0,21

Tabel diatas menunjukkan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 dianggarkan sebesar **Rp. 6.545.675.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.256.811.576,-** dengan sisa sebesar **Rp. 1.288.863.424,-** atau **80,31%**.

## B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Masih kurangnya penanganan anak jalanan (Anjal), anak terlantar, anak putus sekolah dan anak korban narkoba
3. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)
5. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Lemahnya kelembagaan dan jaringan perlindungan anak;
7. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak

Sedangkan Upaya Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

1. Perlu diadakan pelatihan dan penyuluhan terkait ekonomi kerakyatan untuk meratakan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
2. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, anak terlantar, anak putus sekolah dan anak korban narkoba.
3. Melakukan pelatihan dalam pemberdayaan peran aktif perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan sosialisasi di sekolah, dan lembaga-lembaga yang menangani masalah perempuan mengenai perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak serta cara menyikapi kekerasan dengan benar.
6. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait bidang internet dan informasi untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan internet terhadap anak.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.333.430	166.570	88,90
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	89.400.000	57.445.366	31.954.634	64,26
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.000.000	53.757.600	242.400	99,55
4	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000	50.888.100	24.111.900	67,85
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000	12.352.650	3.647.350	77,20
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	15.000.000	7.658.500	7.341.500	51,06
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	6.000.000	5.463.500	536.500	91,06
8	Penyediaan makanan dan minuman	72.550.000	39.605.725	32.944.275	54,59
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	199.995.201	4.799	100
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,000,000	2.540.000	22.460.000	10,16

11	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	593.700.000	563.952.000	29.748.000	94,99
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80.000.000	78.633.250	1.366.750	98,29
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	93.500.000	85.569.000	7.931.000	91,52
14	Pengadaan mebeleur	50.000.000	47.652.500	2.347.500	95,31
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	165.000.000	149.469.300	15.530.700	90,59
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	190.175.000	178.472.393	11.702.607	93,85
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.500.000	9.900.000	2.600.000	79,20
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	6.885.000	8.115.000	45,90
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12.500.000	6.300.000	6.200.000	50,40
20	Penyediaan biaya instruktur senam PNS	4.800.000	4.400.000	400.000	91,67
21	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.500.000	2.450.000	50.000	98,00
22	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.500.000	2.424.000	76.000	96,96
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	9.826.000	174.000	98,26
24	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi keluarga PMKS	260.000.000	212.606.700	47.393.300	81,77
25	Fasilitasi dan pembinaan lansia	65.000.000	58.475.205	6.524.795	89,96
26	Penanganan masalah sosial korban bencana	246.540.000	234.702.350	11.837.650	95,20
27	Monitoring dan evaluasi verifikasi data penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan	170.000.000	154.158.800	15.841.200	90,68
28	Biaya operasional bantuan sosial bagi lansia miskin	140.000.000	126.499.000	13.501.000	90,36
29	Pendampingan program keluarga harapan (PKH)	290.000.000	267.750.200	22.249.800	92,33

30	Pelatihan keterampilan bagi anjal	40.000.000	23.520.000	16.480.000	58,80
31	Evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk	65.000.000	52.826.000	12.174.000	81,27
32	Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar	40.000.000	33.135.000	6.865.000	82,84
33	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan Eks trauma	52.800.000	48.215.000	4.585.000	91,32
34	Penanggulangan eks psikotik dan penderita gangguan jiwa	65.000.000	43.595.250	21.404.750	67,07
35	BOP beras keluarga sejahtera	225.000.000	214.748.000	10.252.000	95,44
36	BOP pemutakhiran BDT penanganan fakir miskin	290.160.000	0	290.160.000	0
37	Pembinaan dan fasilitasi orang dengan berkebutuhan khusus	35.000.000	33.194.900	1.805.100	94,84
38	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	90.000.000	46.314.500	43.685.500	51,46
39	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	356.000.000	312.922.000	43.078.000	87,90
40	Pelestarian nilai-nilai keperintisan,kepahlawanan dan kejuangan	313.300.000	274.469.250	38.830.750	87,61
41	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	20.000.000	15.328.000	4.672.000	76,64
42	Roadshow perlindungan perempuan dan anak di lembaga pendidikan	100.000.000	83.154.600	16.845.400	83,15
43	Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	125.000.000	97.486.000	27.514.000	77,99
44	Pembuatan profil anak tentang data pilah kluster hak anak	110.000.000	81.365.000	28.635.000	73,97
45	Pembinaan terpadu/razia bagi anak usia sekolah yang berperilaku salah	15.000.000	12.740.000	2.260.000	84,93
46	Pembinaan perlindungan anak dan kongres anak	110.000.000	76.957.939	33.042.061	69,96
47	Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan	90.000.000	35.912.469	54.087.531	39,90

	dan perlindungan anak				
48	Komunikasi informasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak	70.000.000	65.656.000	4.344.000	93,79
49	Sosialisasi peningkatan kemandirian remaja dalam industry kreatif	30.000.000	26.279.600	3.270.400	87,60
50	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	35.000.000	29.888.000	5.112.000	85,39
51	Fasilitasi perempuan korban KDRT dan perlindungan anak di Kabupaten Nganjuk	320.250.000	279.549.000	40.701.000	87,29
52	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dna sejahtera (P2WKSS)	130.000.000	122.923.600	7.076.400	94,56
53	Pelatihan KHA bagi pendamping dan konseling korban KTPA	35.000.000	25.392.000	9.608.000	72,55
54	Optimalisasi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak bagi petugas P2TP2A	15.000.000	0	15.000.000	0
55	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	235.000.000	170.952.900	64.047.100	72,75
56	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	105.000.000	73.624.500	31.375.500	70,12
57	Pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan	30.000.000	29.129.400	870.600	97,10
58	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak	170.000.000	152.644.400	17.355.600	89,79
59	Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi pengurus pondok pesantren	100.000.000	72.967.600	27.032.400	72,97
60	TOT pengarusutamaan gender	50.000.000	44.506.500	5.493.500	89,01
61	Pembuatan profil gender	70.000.000	150.000	69.850.000	0,21

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk TA. 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian sasaran / target kinerja pada RPJMD.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan tingkatkan, sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Nganjuk,      Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661005 198703 1 010



Lampiran : Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkendalnya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	Sebanyak 150 Surat dan meterai	1.750.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	2.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhi kebutuhan telepon, air, listrik.	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	100.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	125.000.000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya petugas kebersihan kantor	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	60.000.000.	APBD Kab. Nganjuk	100 %	70.000.000
4	Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Tersedianya Alat Tulis	Dinas Sosial, P3A	12 bulan	47.183.500.	APBD Kab.	90 %	65.000.000

		Kantor (ATK)	Kab.Nganjuk			Nganjuk		
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	20.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	30.000.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	14.892.500	APBD Kab. Nganju	85 %	17.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	7.500.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	8.500.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	69.092.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	75.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	200.000.000	APBD Kab. Nganjuk	95 %	250.000.000
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	15.000.000	APBD Kab. Nganjuk	80 %	20.000.000
B	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
1	Pemeliharaan	Terpeliharaan	Dinas Sosial,	Pemeliharaan kendaraan	200.000.000	APBD	100 %	250.000.000

	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	nya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	P3A Kab.Nganjuk	dinas sebanyak 20 unit dan bbm		Kab. Nganjuk		
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharaan ya secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	Kantor Dinsos,PPPA	9.700.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	12.500.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharaan ya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	2 gedung	120.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	150.000.000
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	3 jenis	15.275.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	50.000.000
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	3 jenis	40.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	75.000.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	41.500.00	APBD Kab. Nganjuk	90 %	100.000.000
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	12.500.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	17.500.000
8	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	5 jenis	41.500.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	60.000.000

9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya a rehab gedung BLK Cangkringan untuk shelter	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	1 gedung	100.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	-
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							
1	Penyediaan biaya instruktur senam PNS	Terwujudnya senam kesehatan jasmani bagi PNS	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	8.800.000	APBD. Kab. Nganjuk	90 %	9.600.000
D	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tercapainya pelaporan Capaian kinerja Ikhtisar Realisasi kinerja OPD	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	3 jenis	10.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	10.000.000
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tercapaiannya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	Sebanyak 1 buku	2.500.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	3.000.000
3	Penyusunan pelaporan keuangan	Tercapaiannya	Dinas Sosial, P3A	Sebanyak 1 buku	2.500.000	APBD Kab.	100 %	3.000.000

	akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab.Nganjuk			Nganjuk		
b.	Urusan wajib							
1	Bid. sosial							
A	Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
1	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi keluarga PMKS	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi keluarga PMKS	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	pemenuhan kebutuhan bagi orang terlantar, dan pengiriman layanan ke Panti Sosial, santunan bagi keluarga PMKS (2.200 orang)	408.480.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	500.000.000
2	Fasilitasi dan pembinaan Lansia	Terbentuk dan terlaksananya fasilitasi kegiatan Lansia	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	65.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	100.000.000
3	Penanganan masalah sosial dan korban bencana	Teratasinya kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat akibat	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	1000 paket sembako	240.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	500.000.000

		bencana alam maupun sosial						
4	Biaya operasional bantuan sosial bagi lansia miskin	Terlaksananya bantuan sosial bagi lansia miskin	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	2213 lansia miskin	140.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	225.000.000
5.	BOP Tim Pelaksana Pendampingan Program Keluarga Harapan ( PKH)	Terlaksananya pendampingan PKH	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	247.400.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	375.000.000
6	BOP Tim Reaksi Cepat Perlindungan Sosial (TRC)	Terlaksananya penanganan PMKS, sosialisasi TRC dan Bimtek TRC, penanganan masalah strategi tentang cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	100.000.000	APBD Kab. Nganjuk	80%	250.000.000
7	Evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	20 Kecamatan	52.700.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	75.000.000
8	Penanganan eks psikotik dan penderita gangguan	Terlaksananya penanganan eks psikotik	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	55 orang	65.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	125.000.000

	jiwa	dan penderita gangguan jiwa						
9	Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana	Tersedianya pelayanan sosial dan penampungan sementara bagi PMKS terlantar	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	155.070.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	200.000.000
10	BOP Tim Koordinasi Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Terlaksananya fasilitasi, verifikasi dan validasi BDT	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	20 Kec, 284 Desa, 20 Kelurahan	366.950.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	500.000.000
B	Program pembinaan Anak Terlantar dan anjal							
1.	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	60 anak	42.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	60.000.000
2.	Pelatihan Ketrampilan bagi Anjal	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi anjal	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	60 anak	42.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	60.000.000
C	Program pembinaan para penyandang cacat dan Trauma							
1.	Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya pelatihan bagi Penyandang cacat dan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	60 orang	42.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	60.000.000

		Eks Trauma						
D	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo							
1	Pembinaan dan fasilitasi orang dengan kebutuhan khusus	Terlaksananya a fasilitasi dan pembinaan bagi penyandang cacat,orang terlantar dan jompo	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	20 orang	35.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	60.000.000
2	Bimtek Pengasuhan Anak sesuai dengan Standard Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)	Terlaksananya a bimtek pengasuhan anak sesuai dengan standard nasional pengasuhan anak (SNPA)	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	25 orang	24.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	40.000.000
3	Bimtek Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Terlaksananya a Bimtek pengelolaan LKSA	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	35 orang	25.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	40.000.000
E	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
1	Peningkatan Jejaring kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial	Terlaksananya peningkatan Jejaring kerja	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	150 orang	75.800.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	125.000.000



	masyarakat	sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat						
2.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya peningkatan SDM (TKSK,PSM) secara profesional	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	250.560.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	300.000.000
3.	Pelestarian Nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta pemeliharaan TMP	Terlaksananya penghormatan kepada perintis kemerdekaan, pejuang, LVRI, DHC 45 serta pilar-pilar sosial serta pemeliharaan TMP .	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	4 kegiatan	304.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	350.000.000
4	Peningkatan Kualitas kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	1 lembaga (WCC)	43.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90%	75.000.000
2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

A	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
1	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ketrampilan, pembinaan terpadu serta evaluasi	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	2 kali	70.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	100.000.000
2	Fasilitasi perempuan korban KDRT dan perlindungan anak Kabupaten Nganjuk	Jumlah pendampingan dan advokasi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	100 kasus	220.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	350.000.000
3	Pelatihan KHA bagi pendamping dan konseling korban KTPA	Terwujud-nya pelatihan KHA bagi pendamping dan konseling korban KTPA	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	40 orang	50.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	75.000.000
4	Optimalisasi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak bagi petugas P2TP2A	Terwujud-nya optimalisasi pelayanan terpadu perlindungan perempuan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	5 kegiatan	15.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	50.000.000

		dan anak						
5	Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	300 orang	25.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	50.000.000
B	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak							
1	Pembinaan perlindungan anak dan kongres anak	Jumlah pertemuan pengurus FA dan gugus tugas KLA dan temu anak	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	16 kali	107.930.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	150.000.000
2	Komunikasi informasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak	Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi perlindungan perempuan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	3 jenis	40.000.000	APBD Kab. Nganjuk	90 %	100.000.000
3	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	12 bulan	40.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	60.000.000

		dan perlindungan anak						
C	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan							
1	Sosialisasi peningkatan kemandirian remaja dalam industri kreatif	Terwujud-nya sosialisasi peningkatan kemandirian remaja dalam industri kreatif	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	25 orang	20.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	50.000.000
2	Pelatihan usaha ekonomi produktif perempuan	Terwujud-nya pelatihan usaha ekonomi produktif perempuan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	25 orang	20.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	50.000.000
3	Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi pondok pesantren	Terlaksana-nya sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender bagi pengurus pondok pesantren	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	80 orang	25.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	50.000.000
4	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender	Terlaksana-nya Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	447 orang	170.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	190.000.000

		dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta evaluasi						
5	Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dalam pembangunan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	300 orang	120.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	200.000.000
6	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah pelaksanaan workshop bagi organisasi perempuan	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	200 orang	55.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	100.000.000
7	Kegiatan TOT pengarusutamaan gender	Terlaksananya TOT pengarusutamaan gender	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	20 orang	20.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	70.000.000
D	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							
1	Roadshow perlindungan perempuan dan anak di lembaga pendidikan	Jumlah sosialisasi PUHA di sekolah	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	9 kali	95.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100 %	120.000.000
2	Monitoring dan Evaluasi Sekolah	Terlaksananya Monitoring	Dinas Sosial, P3A	20 sekolah dan	25.000.000	APBD Kab.	100%	50.000.000

	Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	dan Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	Kab.Nganjuk	Puskesmas		Nganjuk		
3	Fasilitasi Tumbuh Kembang Anak	Terlaksananya fasilitasi tumbuh kembang anak	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	175 Anak PAUD dan anak TK	25.000.000	APBD Kab. Nganjuk	80%	50.000.000
4	Sosialisasi program pengembangan kabupaten layak anak bagi masyarakat	Terlaksananya sosialisasi program pengembangan kabupaten layak anak bagi masyarakat	Dinas Sosial, P3A Kab.Nganjuk	130 orang	40.000.000	APBD Kab. Nganjuk	100%	90.000.000